

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL

Desy Novitasari ¹⁾
Aris Eddy Sarwono ²⁾
Sunarti ³⁾

^{1, 2, 3)} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail: ¹⁾ desynovitasari913@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find evidence about the factors that influence the allocation of capital expenditure budgets in the District and City Governments in Central Java Province. The factors tested in this study are regional own-source revenue, general allocation funds, and special allocation funds with control variables of total assets, surplus / devisit and a comparison between regional own-source revenue and total revenue. The samples in this study were all Regencies and Cities in Central Java Province or 29 Regencies and 6 Cities that issued local government financial reports that were audited by the Supreme Audit Board for the 2014 - 2017 period taken using the Purposive Sampling method. These factors were again tested using panel data regression at a significance level of 5 percent. The results of the study identified that the regional original income variable had no effect on the capital expenditure budget allocation, the general allocation fund variable had a significant positive effect on the capital expenditure budget allocation, while the special allocation fund variable had a significant positive effect on the capital expenditure budget allocation. With a control variable that affects only one, namely the number of assets.

Keywords: *Regional original income, general allocation fund, special allocation fund, allocationcapital expenditure budget.*

PENDAHULUAN

Belanja modal sangat penting untuk pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Melalui UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah, setiap daerah pendapatan asli daerah. Untuk memperkuat hal tersebut maka lahir UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, meningkatkan akuntabilitas daerah dan memberikan kepastian kepada dunia usaha (Carunia Mulya Firdausy (ed), 2017: 9).

Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Dengan adanya transfer dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah mampu mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya. Namun pada kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah. Belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari DAU, dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam APBD.

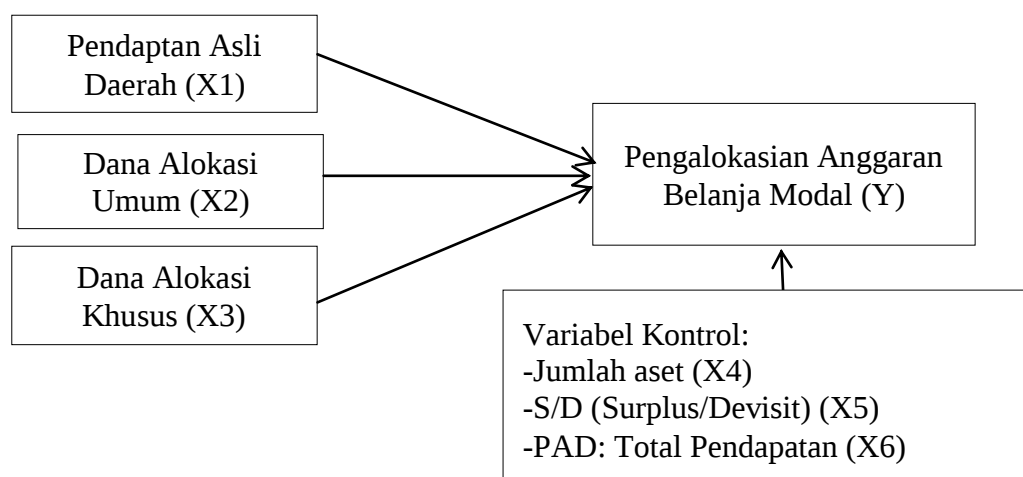
Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Penggunaan DAK diatur oleh pemerintah pusat, dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam Belanja Modal dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk kegiatan fisik.

Saat ini di Indonesia juga mengalami penurunan realisasi anggaran belanja modal. Penurunan anggaran belanja modal juga di alami oleh Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya rendahnya realisasi anggaran pada suatu daerah. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah pengaruh atau tidak variabel-variabel yang terpilih terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini di gambarkan pada gambar I



Gambar I. Kerangka pemikiran

Dari Kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, memiliki arti:

1. Variabel independen (variabel bebas)
Variabel independen pada penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (X1), dana alokasi umum (X2), dana alokasi khusus (X3).
2. Variabel dependen (variabel terikat)
Variabel dependen pada penelitian ini adalah pengalokasian belanja modal.
3. Variabel kontrol
Variabel kontrol adalah variabel konstan untuk variabel bebas tidak dapat dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti dalam penelitian ini adalah jumlah aset, surplus/devisit, dan perbandingan pendapatan asli daerah dengan jumlah pendapatan.

LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Mengutip dari Spence (2002) dalam Connelly, Certo, Ireland, & Reutzel (2011) teori sinyal (*signaling theory*) pada dasarnya berkaitan untuk mengurangi asimetri informasi antara dua pihak. Teori sinyal (*signaling theory*) menjelaskan tentang bagaimana semestinya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan berupa informasi 12 mengenai kinerja manajemen dalam mewujudkan keinginan pemilik. Manajemen akan mengungkapkan informasi yang mampu meningkatkan tingkat kredibilitas serta kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak termasuk dalam informasi yang diwajibkan.

1. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Melalui UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah, setiap daerah pendapatan asli daerah.

H1: PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

2. DAU merupakan pelaksanaan asas desentralisasi dalam otonomi daerah. Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004, total nilai DAU secara keseluruhan minimal 26% dari pendapatan dalam negeri bersih di APBN. Perhitungan alokasi DAU kepada suatu daerah didasarkan pada celah fiskal, yakni selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) daerah dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah (Anggoro, 2017: 24 - 25).

H2: DAU berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

3. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Dengan adanya transfer dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah mampu mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya. DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

H3: DAK berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber dana ke dalam Belanja Modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah, bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai petunjuk (*guidance*) dalam pengalokasian sumber dana dalam APBD. KUA dan PPAS merupakan konkretisasi dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang cukup tentang kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan kebijakan jangka panjang yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2004: 73). Belanja modal dapat juga disimpulkan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/investasi yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan hipotesis dan tujuan dari penelitian yang telah dikemukakan, maka penelitian ini dilakukan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini termasuk dalam golongan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dokumen, laporan dan catatan.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Tengah ada 29 kabupaten dan 6 kota dengan total laporan keuangan pemerintah daerah selama 4 tahun sebanyak 140 laporan. Seluruh data yang digunakan diperoleh dari laporan tahunan disetiap Kabupaten/Kota seluruh Jawa Tengah pada periode 2014 - 2017. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling* di mana sampel yang akan digunakan apabila memenuhi kriteria.

Definisi Operasional Variabel yang Digunakan

a. Pendapatan asli daerah (X1)

PAD Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah Pasal 1 angka 18 bahwa: pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan milik daerah, dan PAD lain-lain yang sah.

b. Dana alokasi umum (X2)

Menurut peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan atau dana alokasi umum, bahwa: dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum untuk setiap daerah tidaklah sama.

c. Dana alokasi khusus (X3)

Merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional antara lain:

kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan lain-lain.

d. Anggaran belanja modal (Y)

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan Metode Analisis Regresi Data Panel. Data panel adalah data yang memiliki jumlah *cross section* dan jumlah *time series*. Metode analisis data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, pemilihan estimasi model regresi data panel, uji asumsi klasik (normalitas, autokorelasi, multikoleniaritas dan heteroskedastisitas), serta uji koefisien determinasi (R^2), uji statistik F dan uji statistik t sebagai uji hipotesis (kelayakan model) yang dilakukan dengan bantuan *software Eviews9*.

HASIL PENELITIAN

1. Pemilihan Model

Tabel 1. Pemilihan model

Uji Chow			
Probabilits F	Indikator Uji	Hasil	Keterangan
0,000	Prob. F < Sig (0,0000 < 0,05)	Ho ditolak	Metode terpilih <i>Fixed Effect</i>
Uji Hausma			
Probabilitas F	Indikator uji	Hasil	Keterangan
5,0244	Prob. Chi2 > Sig (5,0244 > 0,05)	Ho diterima	Model terpilih <i>Random Effect</i>
Uji Lagrange Multiplayer			
Probabilitas bruesch-Pagan		Hasil	Keterangan
0,0000		Ho ditolak	Model terpilih <i>Random Effect</i>

Pengujian model menggunakan penentuan teknik yang paling tepat untuk mengestimasi data panel dengan tiga model yaitu Uji Chow, Uji Hausman dan Uji *Lagrange Multiplayer*. Berdasarkan pengujian model menggunakan *software Eviews9* Uji Chow dan Uji Hausman hasilnya tidak konsisten lalu diuji lagi dengan menggunakan Uji *Lagrange Multiplayer* dan hasil model yang terpilih yaitu model *random effect* lebih baik dalam menginterpretasikan regresi data panel dalam penelitian ini.

2. Uji Asumsi Klasik

Tabel 2. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji normalitas	$0,0000 < 0,05$	Residual berdistribusi tidak normal
Uji multikolinieritas	$r < 0,8$	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Uji autokorelasi	Nilai DW terletak di antara dl dengan du	Tidak dapat disimpulkan
Uji heterokedastisitas	$0,087088 > 0,05$	Homoskedastisitas

Pada uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas yang hasil uji menunjukkan bahwa hasilnya tidak normal, uji multikolinieritas menunjukkan bahwa penelitian ini bebas multikolinieritas, uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi menunjukkan penelitian ini tidak dapat disimpulkan.

PEMBAHASAN

Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa terdapat variabel yang berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, berikut ini pembahasannya:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal hal ini menunjukkan bahwa H1 tidak berhasil. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ndede Yunistin, dkk (2016) yang menyatakan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hasil penelitian ini tidak di dukung oleh penelitian Setiawan dan Saputra, 2018 yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggran belanja modal.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, artinya H2 berhasil didukung .Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sianturi dan Putri, 2018 yang menyatakan dana alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hasil penelitian ini tidak didukung oleh penelitian Widianing Santosa Shanti, dkk (2015) yang mengatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

3. Pengaruh Dana Aloksi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Dana alokasi khusus berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, artinya H3 berhasil didukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wahyuningsih, 2016 yang menyatakan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hasil penelitian ini tidak di dukung oleh penelitian Sianturi Heriston, Anastasya Astrid Eka Putri (2018) yang menyatakan bahwa Dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan makan dapat disimpulkan bahwa hasil uji pemilihan model dengan menggunakan *uji chow*, *uji hausman* dan *lagrange multiplayer* terpilih *random effect*. Pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal ditahun 2014 - 2017. Hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien regresi variabel PAD sebesar 0,187673, dengan nilai *probability* sebesar 0,8514. Artinya H1 ditolak. Dana alokasi umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal ditahun 2014 - 2017. Hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien regresi variabel DAU sebesar 0,155710, dengan nilai *probability* sebesar 0,0000.

Koefisien regresi variabel DAU sebesar 0,155710 juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan 0,1% DAU akan diikuti oleh penambahan pengalokasian anggaran belanja modal. Artinya H2 dapat diterima. Dana alokasi khusus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal tahun 2014 - 2017. Hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien regresi variabel DAK sebesar 0,417786, dengan nilai *probability* sebesar 0,0000. Koefisien regresi variabel DAK sebesar 0,417786 juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan 0,4% DAK akan diikuti oleh penambahan pengalokasian anggaran belanja modal. Artinya H3 dapat diterima. Jumlah aset berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, hal ini ditunjukkan pada nilai *prob.* $0 < 0,05$ maka jumlah aset dapat dijadikan variabel kontrol dalam penelitian ini. Surplus devisa dan perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan jumlah pendapatan tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, hal ini ditunjukkan dari nilai *prob.* $> 0,05$ artinya variabel surplus devisa dan perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan jumlah pendapatan tidak dapat dijadikan variabel kontrol dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Retribusi dan Retribusi Daerah*. UB Press. Malang.
- Dielman. 1961. *Applied Regresion Analysis For Bisnis and Economics*. PWS KENT Publishing Company
- Ga, Rafael Daud. 2017. *Akuntansi Dasar*. Andi.Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 4)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, A. 2007. *Dasar-Dasar Ekonometrika (Jilid 1) (Edisi 3)*. Erlangga. Jakarta.
- Halim. 2004. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Andi.Yogyakarta.
- Hariyati, Tri Retno Tahun 2012. Faktor Determinan Atas Utang Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai Variabel Antara. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol. 3, No. 3 (2012).
- Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014,*
- Lembaran Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*
- Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.*
- Lembaran Negara Republik Indonesia, *pasal 50 huruf C Pmendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Pmendagri NO. 30/2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.Yogyakarta.
- Nachrowi, D Nachrowi. dan Usman, Hardius. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan, dilengkapi Teknik Analisis dan Pengolahan Data dengan SPSS dan Eviews*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018
- Rudianto, 2012. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Deepublish. Yogyakarta.
- Rumeri, Ufi. Tahun 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu Manajemen* Vol. 2 No. 2
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2010. Edisi 5, *Research Method For Business: A Skill Building Approach*. John Wiley @ Sons, New York.
- Widianaputra, A.A. dan Mimba, N.P.S.H. 2014. "The Influence of Participative Budgeting on Budgetary Slack in Composing Local Government' Budget In Bali Province". *Procedia Social and Behavioral Sciences*. ICAS 391-396. Universitas Utara Malaysia.
- Widarjono, Agus. 2007. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi Edisi Kedua*. Ekonisia. Yogyakarta.